

PERBEDAAN MATA PELAJARAN PPKN KELAS 10 SMA DARI MATERI PEMBELAJARAN, WAKTU PEMBELAJARAN, DAN METODE PEMBELAJARAN DI KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

¹Ahmad Hisyam Muharam , ²Andini Syfa Martiana, ³Arif Firmansyah

¹Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Dr.Prof Hamka
ahmadhisyammuharam@gmail.com

²Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Dr.Prof Hamka
Andinimartiana@gmail.com

³Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Dr.Prof Hamka
ariffirmansyah90747@gmail.com

ABSTRAK

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X SMA mempunyai perbedaan materi pembelajaran dan metode pengajaran antara kurikulum 2013 dengan kurikulum mandiri. Jurnal ini akan memberikan analisis yang lebih rinci tentang perbedaan-perbedaan ini. Proses pembelajaran kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya, meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami dan menghormati hak asasi manusia.

Kata kunci: Ppkn, SMA kelas X, Kurikulum 2013.

ABSTRACT

The Pancasila Education and Citizenship (PPKn) subjects of the X grade high school have differences in the learning material and teaching methods between the 2013 curriculum and the independent curricula. The citizenship learning process aims to enable the student to actively develop the various potential that exists within him, increase his intelligence, skills, and awareness of his rights and responsibilities as an Indonesian citizen, aimed at helping people understand and respect human rights. This journal will give you a more detailed analysis of these differences.

Keyword : The Pancasila Education and Citizenship (PPKn) subjects, High school, 2013 curriculum.

I. PENDAHULUAN

Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan fenomena kesetaraan bangsa tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, golongan, budaya, atau suku. Siswa diharapkan berpartisipasi dalam pembelajaran situasional dengan mempertimbangkan fenomena berikut: Jika proyek dilaksanakan oleh masyarakat, maka mereka harus memecahkan atau menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat sekitar.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai tujuan ke mana pendidikan dijalankan. Kurikulum pertama kali dibuat di Indonesia pada tahun 1947.

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Kepemilikan merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pengajaran mata pelajaran kewarganegaraan. Kurikulum 2013 dirancang untuk siswa dengan pendekatan pengajaran terbaru. Prinsip kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013 adalah proses pendidikan yang dipersonalisasi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memaksimalkan kemampuan mereka.

Meskipun Kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berbasis keterampilan, Kurikulum Mandiri memberikan kebebasan lebih besar kepada guru dan siswa dalam menentukan cara belajarnya. Kurikulum 2013 merupakan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada landasan yuridis yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (Kemendikbud, 2012:1). Menurut Prof. Dr. H. M. Arifin Junaidi, M.Ed, Sang Ahli pendidikan menyoroti bahwa Kurikulum 2013 dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik, dengan lebih menekankan pada pengembangan karakter dan kecakapan hidup.

Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka lebih menekankan

konten penting dan pengembangan karakter dan keterampilan siswa, membuatnya lebih fleksibel dan kreatif. Menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini mengemukakan bahwa Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan tantangan lokal di masing-masing daerah. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih adaptif sebagai bagian dari inisiatif reformasi pembelajaran, dengan fokus pada materi yang penting dan pengembangan karakter serta keterampilan siswa (Kemendikbud, 2022).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur berupa peraturan Menteri Pendidikan, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. *Style dan komponen*

No	Style	Komponen
1.	Perbedaan perangkat kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka	Materi Pembelajaran
2.	Perbedaan Struktur Pembelajaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka	waktu pembelajaran
3.	Perbedaan cara pengajaran kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka	Metode Pembelajaran

Sumber: dokumen kemendikbud. 2022

Menurut hasil yang didapatkan berdasarkan dokumen kemendikbud 2022 Perbedaan Struktur kurikulum antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 terdiri dari :

- **Perbedaan materi pembelajaran.**

Perbedaan perangkat kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yaitu terdapat perbedaan materi pembelajaran.

Pada Kurikulum 2013 Materi pembelajaran PKN terdiri dari 7 bab yaitu :

Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Bab 5 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika :

Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia

:

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia B. Pentingnya Konsep Integrasi Nasional

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan . D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Bab 2 Ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara : E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **Bab 6 Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika:**

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia A. Ancaman terhadap Integrasi Nasional

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia B. Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. C. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional.

Bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Bab 7 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia**

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia A. Wawasan Nusantara

B. Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 B. Kedudukan Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.	D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Kebangsaan	Implementasi	Wawasan
--	--	--------------	---------

Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah :

Sumber : buku.kemdikbud.go.id

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks

Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Sementara itu pada kurikulum merdeka materi PPKN ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.	Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional
A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara :	A. Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPKI	B. Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila
N2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945.	C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keragaman
B. Dinamika Kelahiran Pancasila	Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik
1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama	A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila	1. Arti Hak dan Kewajiban
3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila	2. Lingkungan Sekolah dan Masyarakat
C. Kedudukan Pancasila	3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat
1. Pancasila sebagai Dasar Negara	B. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup	C. Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara.	1. Posisi Warga Negara
D. Aktualisasi Pancasila	2. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara .
1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia
2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila.	1. Arti Pertahanan dan Keamanan Negara
Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum .	2. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
A. Membangun Kesadaran Hukum	3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara
1. Kesadaran Hukum	4. Pembangunan Nasional di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara
2. Tujuan Hukum	E. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara
3. Sumber Hukum	1. Arti, Faktor Penyebab, dan Tujuan dari Hubungan Internasional
B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum	2. Bidang-bidang Hubungan Internasional
1. Hubungan Hukum dan Norma	3. Asas dalam Hubungan Antarbangsa dan Negara (Hubungan Internasional)
2. Substansi Penegakan Norma Hukum	4. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional
3. Pembagian Hukum	F. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional
4. Perilaku Taat Hukum	

5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan

Berdasarkan Pancasila

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran

Kewajiban

1. Hubungan Hak dan Kewajiban

2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Sumber : buku.kemdikbud.go.id

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global

D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan

Perundang-Undangan

2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

Perundang-Undangan

3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan

Perundang-Undangan

- **Perbedaan waktu pembelajaran.**

Terdapat Perbedaan waktu pembelajaran yaitu pada struktur kurikulum 2013 Jam Pelajaran (JP) diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran.

Sementara itu, Struktur kurikulum merdeka Jam Pelajaran (JP) diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditentukan serta ada 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu: Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

- **Perbedaan Metode pembelajaran.**

Perbedaan Pembelajaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka meliputi perbedaan metode pembelajaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

Pada Kurikulum 2013 Metode dan Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler (tatap muka), untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% diluar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan.

Sementara itu pada kurikulum merdeka Menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik Paduan antara pembelajaran intrakurikuler (sekitar 70-80% dari jam pelajaran) dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila(sekitar 20-30% jam pelajaran).

IV. KESIMPULAN

Perbedaan yang signifikan antara

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn kelas 10 SMA terlihat pada aspek waktu belajar, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang lebih terstruktur dengan alokasi waktu yang tetap dan fokus pada pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Materi pembelajaran pada Kurikulum 2013 cenderung lebih detail dan mendalam, dengan penekanan pada teori-teori PPKn serta kajian mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan sistem pemerintahan.

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam waktu belajar, memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan waktu pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks lokal. Materi pembelajaran di Kurikulum Merdeka lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa, dengan penekanan pada praktik langsung dan penerapan nilai-nilai PPKn dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka juga lebih variatif dan berpusat pada siswa, seperti project-based learning dan inquiry-based learning, yang mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam proses belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Irmaliya Izzah Salsabilla, Erisya Jannah, Juanda Juanda. (2023). *Analisis Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka. Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samawa.*

Wahyuni, S. (2022). *Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 6. Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI.*

Mila Yaelasari, Vera Yuni Astuti. (2022).
Implementasi Kurikulum Merdeka pada
Cara Belajar Siswa untuk Semua Mata
*Pelajaran. **Jurnal Pendidikan Indonesia,***
Vol. 3, No. 7, Universitas Indraprasta.

Abdul Fattah Nasution, Setia Ningsih, Mona
Febrica Silva, Leli Suharti, Jekson
Parulian Harahap. (2023). *Konsep dan*
Implementasi Kurikulum Merdeka.
COMPETITIVE: Journal of Education,
Vol. 2, No. 3.

Buku:

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014
Kurikulum 2013 2. PMP PPKn SMA.